

**STRATEGI DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI
DAN UKM DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Kintan Nanda Cahyani
NIM. 200801020



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2024 M / 1446 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Kintan Nanda Cahyani
NIM : 200801020
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Langung, 04 April 2002
Alamat : Desa Langung, Kecamatan Meureubo

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini,saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini,maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Desember 2024

Yang Menyatakan

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Kintan Nanda Cahyani

**STRATEGI DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI
DAN UKM DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan
Skripsi Pada Program Sarjana Prodi Ilmu Politik

Oleh:

Kintan Nanda Cahyani
NIM. 200801020

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP. 197810162008011011

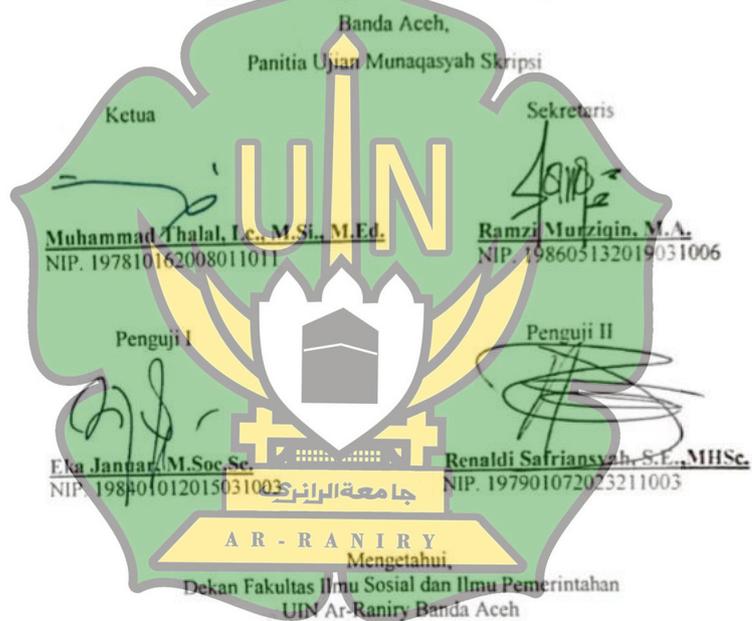
AR - RANIRY

**STRATEGI DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI
DAN UKM DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

KINTAN NANDA CAHYANI
NIM. 200801020

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal: Jumat, 10 Januari 2025



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah, namun sektor ini menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan teknologi. Oleh karena itu, Dinas terkait berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM melalui berbagai program, seperti pelatihan, pemberian bantuan modal, fasilitasi pemasaran, dan pengembangan infrastruktur. Serta mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Barat dalam pengembangan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang melibatkan wawancara mendalam dengan pengusaha UMKM serta pejabat terkait di dinas tersebut, serta analisis terhadap data sekunder yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat telah mengimplementasikan sejumlah strategi untuk mendukung pengembangan UMKM, antara lain melalui pelatihan dan pendampingan, pemberian bantuan modal, fasilitasi pemasaran produk, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas program pelatihan, penguatan pemasaran digital, serta pengembangan infrastruktur yang lebih mendukung untuk mempercepat pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Barat.

Kata Kunci: *Strategi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, Pengembangan Umkm, Kabupaten Aceh Barat*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'l'amin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan ukm Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Aceh Barat”** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah menjadi cahaya penerang yang membawa kita dari alam kebodohan hingga berilmu pengetahuan.

Penyusunan proposal skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan doa dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, penghargaan dan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta yaitu cinta pertama ayahanda Dedi Arnan dan ibunda tercinta Siti Farida Hanum yang telah menjadi inspirasi dan sumber kekuatan bagi penulis dalam setiap langkah kehidupan penulis. Tak

terhitung rasa syukurku atas pengorbanan, kasih sayang, dan doa tanpa henti yang telah kalian lakukan. Terutama kepada ibunda tercinta yang telah tiada, walau raganya tidak ada disamping penulis, akan tetapi cinta dan kasih sayangnya akan selalu abadi didalam hati penulis. Terimakasih atas pengorbanan, keringat dan air mata yang telah kalian curahkan untuk masa depan penulis. terimakasih banyak sudah membuka jalan impian penulis untuk menyanggah gelar sarjana. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini serta tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kalian dan selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan setiap aktivitas. Skripsi ini adalah bukti bakti dan cinta kasih kepada orang tua tercinta. Love you forever ibu dan ayah.

2. Kepada saudara tercinta saya, Derry Ardiansyah bersama kakak Marfirah, dan Hafizh Eza Munandar terima kasih banyak atas do'a dan dukungan moral maupun materil, terima kasih juga atas segala dorongan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Kepada keponakan tercinta Cut Aisyah terimakasih atas kebersamaan yang telah mewarnai hidupku. Termakasih telah memberi kesenangan dan tawa setiap harinya. sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
4. Kepada Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku rektor UIN Ar-Raniry.

5. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
6. Rizkika Lhena Darwin, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik. Ramzi Murziqin, S.H.I.,M.A., selalu skretaris prodi ilmu politik, dan Mumtazinur, S.IP., M.A. Selaku Penasehat Akademik.
7. Terima kasih banyak kepada bapak Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan, mengajarkan dalam proses penulisan dan pengerjaan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan.
8. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pengawain fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya unrtuk diwawancarai dalam memberikan informasi terkait penulisan skripsi
10. Instansi terkait yang telah bersedia membantu dan memberikan data kepada penulis dalam hal ini yakni Dinas perdagangan perindustrian koperasi dan ukm aceh barat.
11. Kepada Rijal Efendi, terima kasih telah kebersamai penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi ini, dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, meluangkan waktu, pikiran dan memotivasi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

12. Terimakasih kepada diriku sendiri yang telah berani melangkah dan pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas kegigihan, ketekunan, dan semangat yang tak pernah padam. Meskipun banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi, aku selalu meyakinkan diri ini bahwa aku bisa melewati semuanya. Skripsi ini adalah bukti bahwa aku mampu berkomitmen dengan diriku untuk menyelesaikan semua ini. Terimakasih diriku tetap kuat ditengah badai yang menghadang. Semoga ini akan menjadi awal pencapaian yang lebih besar di masa depan. Aamiin.

Semoga segala bentuk dukungan, bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi setiap pembacanya serta bagi pengembangan program studi Ilmu Politik.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 latar belakang	1
1.2 Fokus Kajian	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penlitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.1.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah	10
2.2.2 Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	12
2.2.3 Strategi.....	13
2.2.4 Manajemen Strategi.....	13
2.2 Landasan Teori.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Rancangan Penelitian	21
3.2 Lokasi Penelitian	21
3.3 Sumber Data.....	22
3.3.1 Data Primer	22
3.3.2 Data Sekunder.....	22
3.4 Informan Penelitian	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5.1 Observasi	23
3.5.2 Wawancara	24
3.5.3 Dokumen	24
3.6 Teknik Analisis Data	25

3.6.1	Reduksi data.....	25
3.6.2	Penyajian Data	26
3.6.3	Penarikan kesimpulan	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		27
4.1	Hasil Penelitian	27
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
4.1.2	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	29
4.1.3	Visi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat.....	41
4.1.4	Misi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat.....	41
4.1.5	Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat	43
4.2	Pembahasan.....	43
4.2.1	Strategi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat	43
4.2.2.	Efektivitas Program Pengembangan UMKM.....	55
4.2.4.	Tantangan yang Dihadapi pelaku UMKM	58
BAB V PENUTUP		62
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		67
LAMPIRAN		70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Ukm Aceh Barat	43
------------	--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan	23
-------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Penelitian	70
Lampiran 2 Surat Penelitian	72
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian	73
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	74
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

Pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat membantu dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. UMKM juga memiliki kontribusi besar dalam pemerataan ekonomi serta pengurangan kemiskinan. Di Aceh Barat, sektor UMKM menjadi salah satu pilar utama yang menopang perekonomian masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, di mana sebagian besar penduduknya bergantung pada usaha kecil dan mikro untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Namun, meskipun UMKM memiliki potensi yang sangat besar, pengembangan sektor ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap permodalan, rendahnya daya saing produk, keterbatasan teknologi, serta kurangnya pengetahuan dalam manajemen bisnis. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah, khususnya Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM agar dapat bersaing di pasar lokal, nasional, maupun internasional.

Di Kabupaten Aceh Barat, Disperindagkop UKM memiliki tanggung jawab besar dalam merancang dan melaksanakan strategi pengembangan UMKM. Dinas ini berperan dalam berbagai aspek, mulai dari pembinaan kapasitas pelaku usaha, penguatan kelembagaan koperasi, hingga fasilitasi permodalan dan pemasaran

produk. Namun, dalam implementasinya, berbagai masalah masih menghambat pencapaian tujuan pengembangan UMKM yang optimal. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain adalah terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, rendahnya kualitas produk yang dihasilkan, serta terbatasnya jaringan pemasaran yang dapat diakses oleh pelaku UMKM.

Selain itu, strategi yang diterapkan oleh Disperindagkop UKM Kabupaten Aceh Barat dalam mengembangkan UMKM masih belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada. Program-program yang dirancang sering kali tidak tepat sasaran atau tidak mampu menjangkau seluruh pelaku UMKM yang membutuhkan. Faktor geografis Kabupaten Aceh Barat yang terletak di pesisir dengan banyak daerah terpencil juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan strategi pengembangan UMKM. Selain itu, banyak pelaku UMKM yang kurang memanfaatkan teknologi dan informasi dalam mengembangkan usaha mereka, sehingga menghambat akses mereka ke pasar yang lebih luas.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah kurangnya koordinasi antara Disperindagkop UKM dengan lembaga atau instansi lain yang juga memiliki tanggung jawab dalam pengembangan UMKM, seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Bank Indonesia, maupun lembaga keuangan lainnya. Tanpa adanya sinergi yang baik antar lembaga ini, program pengembangan UMKM akan sulit untuk berjalan efektif dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Barat.

Selain masalah internal, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan

bencana alam juga turut memengaruhi perkembangan UMKM di daerah ini. Kabupaten Aceh Barat, yang pernah dilanda bencana tsunami pada tahun 2004, masih memerlukan perhatian khusus dalam hal pemulihan ekonomi, terutama untuk sektor UMKM yang menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir sektor UMKM mulai pulih, namun tantangan baru seperti harga bahan baku yang fluktuatif dan kebijakan ekonomi yang tidak selalu berpihak pada pelaku UMKM masih menjadi hambatan utama.

Berdasarkan permasalahan di atas, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi yang diterapkan oleh Disperindagkop UKM Kabupaten Aceh Barat dalam pengembangan UMKM. Evaluasi terhadap strategi yang sudah dijalankan selama ini akan memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan yang ada dalam program-program pengembangan UMKM di daerah tersebut. Dengan demikian, evaluasi ini dapat menjadi bahan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran di masa depan.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan komersial yang memperluas kesempatan kerja dan memberikan berbagai layanan ekonomi kepada masyarakat lokal, memahami peran masyarakat lokal, membantu pemerataan dan peningkatan pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan keseimbangan nasional. Selain itu, usaha kecil dan menengah yang merupakan salah satu penopang perekonomian nasional juga tidak boleh diabaikan, namun harus diberi kesempatan, dukungan, dan perlindungan yang sebesar-besarnya agar dapat berkembang dengan dukungan yang terpadu terhadap kelompok ekonomi nasional dengan tidak mengabaikan peran Usaha

Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun UMKM telah terbukti berperan penting dalam perekonomian nasional, namun pelaku usaha tetap memiliki hambatan dan kendala di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, serta permodalan internal dan eksternal.

Berbagai kebijakan cadangan usaha, pembiayaan dan pembangunan telah diperkenalkan untuk meningkatnya peluang, kemampuan dan perlindungan bagi UMKM, namun hal ini masih kurang optimal. Hal ini karena kebijakan tersebut tidak memberikan peluang yang cukup untuk melindungi UMKM serta mengamankan dan memperkuat keamanan perusahaan. Dalam situasi seperti ini, perlu diciptakan lingkungan usaha yang mendukung perkembangan UMKM dan penguatan kapasitas tersebut melalui pengembangan dan kepastian hukum yang berlaku.

Dalam pasal 7 UU Nomor 20 tahun 2008 disebutkan bahwa :

(1) A Pemerintah dan Pemerintah Daerah menciptakan lingkungan kewirausahaan dengan memberlakukan undang-undang dan kebijakan, termasuk:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif dalam pengembangan lingkungan bisnis yang dijelaskan pada ayat berikut (1).¹

Kabupaten Aceh Barat memiliki beragam UMKM yang harus tumbuh dan berkembang untuk mendukung perekonomian daerah. Oleh karena itu, tantangan bagi UMKM adalah mengubah pelaku usaha menjadi usaha yang kreatif dan inovatif untuk memperkuat daya saing lokal dan tumbuh secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi UMKM selalu terkait dengan berbagai aspek, antara lain stabilitas politik di tingkat lokal, kebijakan perpajakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, serta dukungan politik yang kuat dari berbagai pihak terhadap respon masyarakat yang saling terhubung dengan pengembangan UMKM. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Strategi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Aceh Barat”**.

1.2 Fokus Kajian

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak menyeluruh, maka penelitian ini berfokus pada strategi dinas perdagangan perindustrian koperasi dan ukm dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat. Dan terfokus pada sejauh mana keberhasilan upaya pemerintah dalam mengembangkan umkm serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu kajian ini juga akan mengidentifikasi factor-faktor dinamika politik yang dapat

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang* Nomor 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Bab V, pasal 7.

menghambat pertumbuhan umkm dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku umkmdan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan pemerintah di masa yang akan datang.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa saja strategi yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM dalam pengembangan UMKM?
2. Bagaimana efektivitas strategi yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM dalam mendukung perkembangan UMKM?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini:

1. Untuk menganalisis sejauh mana strategi dinas perdagangan perindustrian koperasi dan ukm dalam mengembangkan UMKM
2. Untuk mengevaluasi efektifitas dari strategi yang diterapkan oleh dinas perdagangan perindustrian koperasi dan ukm dalam mendukung perkembangan UMKM

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi program studi ilmu politik dengan hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi upaya peningkatan dunia usaha, industri, koperasi dan UKM dalam memajukan pemerintahan daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi ruang pengetahuan mengenai pentingnya Disperindangkop terhadap kemajuan UMKM di wilayah Aceh Barat.
3. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang berguna terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM dalam peningkatan UKM di Aceh Barat.
4. Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi teoritis dan empiris bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum informasi dari penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu dapat menjadi acuan, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama yang penulis jadikan sebagai rujukan oleh (Arif Pujiono, Ro'fah Setyowati, Idris) tentang **“Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global”** yang menghasilkan bahwa fokus penelitian ini adalah peningkatan sertifikasi UMKM Halal dan meningkatkan kualitas SDM Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Halal dengan memakai teknologi terkini dan terbaik. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan data statistik non parametrik. Penelitian ini terdapat beberapa faktor internal, kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal. Maka, strategi yang digunakan adalah dengan mengedepankan kualitas dan standarisasi produk UMKM Halal dengan menggunakan teknologi terkini dan terbaik.²

Penelitian kedua yang penulis jadikan sebagai rujukan oleh (Fauzi Arif Lubis, Nur Ahmadi Bi Rahmani, Intan Kartika Putri) tentang **“Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT. PNM Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam”** menghasilkan bahwa fokus dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan akses permodalan dengan memanfaatkan hubungan yang harmonis antar pemilik modal,

² Arif Pujiono, Ro'fah Setyawati, and I Idris, 'Strategi Pengembangan Umkm Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global', *Indonesia Journal of Halal*, 1.1 (2018), p. 1.

sehingga memperluas UMKM di Kota Medan kemudian menciptakan jaringan usaha yang fleksibel di PT.PNM Kota Medan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) dengan menggunakan data primer dan sekunder, menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.PNM Mekaal memiliki keunggulan berupa kemudahan akses permodalan dan adanya peluang seperti subsidi margin dari pemerintah.³

Penelitian ketiga yang penulis jadikan sebagai rujukan oleh (Edy Suandi Hamid, Y. Sri Susilo, 2011) tentang **“Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”** yang menghasilkan bahwa fokus studi ini adalah tantangan dan hambatan yang dirasakan oleh UMKM dengan memerlukan dukungan mitra serta kebijakan untuk mendorong perkembangannya. Metode penelitian ini menggunakan metode yang menggambarkan data primer dan sekunder yang didapatkan. Data primer diperoleh melalui survei lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi pengembangan UMKM di Yogyakarta dapat secara signifikan mempercepat transisi usaha kecil dari fase start-up ke fase stabil. Kebijakan dan strategi tersebut mencakup berbagai kursus pelatihan untuk mengembangkan suatu barang yang semakin beragam dan bertujuan pada kualitas berdasarkan sumber daya daerah serta dukungan pemerintah terhadap perkembangan pengolahan suatu barang dengan merevitalisasi mesin dan sistem yang lebih

³ Fauzi Arif Lubis, Nur Rahmani Bi Ahmadi, and Intan Kartika Putri, ‘Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT. PNM Kota Medan’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.1 (2023), pp. 949–62.

modern.⁴

Persamaan diantara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian-penelitian yang akan peneliti lakukan dimasa yang akan datang adalah keduanya menggunakan metode yang sama, seperti teknik pengumpulan data observasional, dokumentasi, dan pendekatan kualitatif dengan menggunakan statistik nonparametric, serta membahas mengenai strategi pengembangan UMKM. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian yang akan datang adalah penelitian dilakukan pada waktu berbeda, lokasi yang berbeda, dan dengan teori yang berbeda.

2.1.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pengertian UMKM ditetapkan dalam Undang-undang No.9 Tahun 1999 dan dirubah ke UU No.20 Pasal I Tahun 2008 terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dikarenakan situasi pembangunan yang semakin dinamis. Berikut pengertian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, adalah:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan badan hukum tersendiri yang memenuhi kriteria hukum usaha mikro. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga

⁴ Edy Suandi Hamid and Y. Sri Susilo, 'Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*', *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12.1 (2015), p. 45.

ratus juta rupiah).

2) Usaha Kecil adalah usaha produktif mandiri yang dimiliki atau dikuasai baik langsung maupun tidak langsung, tidak termasuk dalam anak perusahaan, cabang, atau usaha menengah dan besar, serta memenuhi persyaratan standar untuk usaha kecil dengan tujuan hukum; Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Usaha Menengah adalah usaha yang mandiri, produktif, dan mandiri yang bukan merupakan anak usaha atau cabang usaha yang dijalankan langsung atau tidak langsung oleh usaha kecil dan besar berdasarkan kekayaan bersih atau pendapatan tahunan yang dilaporkan menurut hukum. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00

(lima puluh milyar rupiah).

4) Usaha Besar meliputi usaha bisnis dengan produktivitas lebih tinggi dibandingkan usaha asing, dan perusahaan menengah seperti usaha besar, usaha publik, usaha swasta, perusahaan patungan, dan perusahaan dengan aset bersih dan usaha tahunan yang tinggi yang aktif melakukan kegiatan perekonomian di Indonesia.

5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar yang melakukan kegiatan perekonomian di Indonesia dan berkantor pusat di Indonesia.

2.1.2 Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pengembangan usaha merupakan tanggung jawab setiap pengusaha dan memerlukan intuisi, motivasi dan kreativitas. Dalam hal ini, perusahaan kecil sekalipun bisa menjadi perusahaan besar jika dikelola dengan baik. Namun kesuksesan ini terjadi dengan lancar seiring berjalannya waktu. Peningkatan penjualan menunjukkan kemajuan perusahaan.

Jika semua pengusaha bisa melakukan hal ini, besar kemungkinannya untuk mengubah usaha kecil dan menengah menjadi usaha korporasi besar. Kegiatan wirausaha dapat diawali dengan membentuk suatu perusahaan, mengadakan suatu persekutuan, atau mengakuisisi perusahaan orang lain yang disebut dengan waralaba. Namun sangat perlu dipertimbangkan ke mana arah bisnis tersebut. Oleh karena itu, pengembangan diperlukan agar berhasil mengelola, memperluas, dan mengelola sebuah perusahaan. Pengembangan bisnis memerlukan dukungan di banyak bidang, termasuk manufaktur dan pengolahan, pemasaran, sumber daya

manusia, dan teknologi.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Pengembangan UMKM melibatkan berbagai aspek, baik dari segi sumber daya manusia, modal, teknologi, maupun pemasaran, dengan tujuan untuk menciptakan usaha yang lebih efisien, produktif, dan mampu bersaing di pasar lokal maupun global.

2.1.3 Strategi

Strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang seperti ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, divestasi, divestasi, kebangkrutan, dan usaha patungan adalah teknik yang umum. Strategi adalah tindakan potensial yang memerlukan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang signifikan.

Strategi adalah rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan tindakan utama organisasi melalui langkah-langkah proses implementasi yang terintegrasi. Menurut definisi tersebut, strategi dapat dikatakan sebagai pengambilan keputusan dan perencanaan tujuan jangka panjang oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan melalui model dan rencana organisasi.

2.1.4 Manajemen Strategi

Manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai formalisasi keterampilan dan pengetahuan. Menerapkan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang membantu organisasi mencapai tujuan ini. Menurut definisi ini, manajemen

strategis berfokus pada upaya mengkoordinasikan manajemen, pemasaran, akuntansi keuangan, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi untuk mencapai keberhasilan organisasi.

Ada tiga tahap manajemen strategi antara lain sebagai berikut: perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi. Fase-fase manajemen strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

Manajemen strategis memiliki tiga langkah yaitu Perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi. Tahapan manajemen strategi dapat digambarkan sebagai berikut:

Formulasi strategi melibatkan perkembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal terhadap organisasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, menentukan tujuan jangka panjang, memulai strategi alternatif, dan mengidentifikasi cara untuk mencapai pemilihan strategi.

Implementasi Strategi (strategi implementation) memerlukan pengembangan tujuan tahunan, panduan motivasi karyawan, dan alokasi sumber daya. Hal ini memungkinkan untuk menerapkan strategi yang dikembangkan.

Evaluasi strategi (strategi evaluation) merupakan langkah terakhir dalam manajemen strategis. Manajer harus menyadari ketika strategi tertentu tidak berhasil. Tiga aktivitas penilaian strategis tersebut meliputi pemeriksaan faktor internal dan eksternal yang mendasari strategi saat ini, pengukuran kinerja, dan pengambilan tindakan perbaikan.

2.2. Landasan Teori

Intervensi pemerintah dalam ekonomi mikro merupakan suatu aspek penting yang mencerminkan peran aktif pemerintah dalam mengatur dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro. Intervensi ini sering kali dilakukan melalui berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks ini, penting untuk memahami berbagai bentuk intervensi yang diterapkan oleh pemerintah serta dampaknya terhadap perekonomian mikro.

Salah satu bentuk intervensi yang sering dilakukan adalah melalui kebijakan perpajakan. menunjukkan bahwa intervensi terhadap kebijakan perpajakan daerah dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi.⁵ Kebijakan ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga berperan dalam pemulihan ekonomi nasional, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19. Di sisi lain, intervensi ini juga dapat berimplikasi pada penurunan PAD, yang menunjukkan adanya trade-off yang perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan.

Selain kebijakan perpajakan, bantuan langsung kepada UMKM juga merupakan bentuk intervensi yang signifikan. Wijayaningsih et al. mencatat bahwa selama pandemi Covid-19, pemerintah memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BanPres Produktif) untuk membantu UMKM yang terdampak Bantuan ini

⁵ Rahman, dkk (2022). Intervensi tarif pajak daerah menurut undang-undang cipta kerja: analisis implikasi dan strategi pemulihan ekonomi kala pandemi covid-19. *Educoretax*, 2(1), 35-48.

dirancang untuk meningkatkan daya tahan usaha mikro dan kecil, serta mendorong pemulihan ekonomi di daerah yang mengalami kontraksi ekonomi. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan UMKM dapat bertahan dan berkontribusi kembali terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.⁶

Pentingnya peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi juga ditekankan oleh Kusumawardhana, yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur publik dan mengatur aktivitas ekonomi untuk mendukung agenda pembangunan.⁷ Dalam konteks negara berkembang, intervensi pemerintah menjadi semakin krusial karena sering kali terdapat ketidakcukupan dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, intervensi yang tepat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pelaku ekonomi mikro.

Dari perspektif makroekonomi, intervensi pemerintah juga dapat mempengaruhi pasar modal dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Sinaga et al. mengamati bahwa intervensi pemerintah selama pandemi Covid-19 memiliki dampak signifikan terhadap pasar saham di Indonesia, dengan berbagai kebijakan yang diterapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah tidak hanya terbatas pada sektor mikro, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap perekonomian nasional.

⁶ Wijayaningsih, dkk (2021). Analisis program bantuan presiden produktif usaha mikro, kecil, dan menengah pada masa pandemi covid-19 kabupaten sleman yogyakarta. *Jurnal Wacana Kinerja Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24(2), 98.

⁷ Kusumawardhana, I. (2023). A dynamic system approach: modalitas kontrol pemerintah terhadap agenda pembangunan di negara berkembang. *Thejournalish Social and Government*, 4(2), 146-162.

⁸ Sinaga, dkk (2022). Impact of government interventions on the stock market during covid-19: a case study in indonesia. *Sn Business & Economics*, 2(9).

Dalam konteks akses pembiayaan, Anjani dan Purnamasari menyoroti pentingnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi UMKM. KUR dirancang untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku usaha mikro dan kecil, terutama di masa sulit seperti pandemi. Dengan bunga yang rendah dan syarat yang lebih ringan, KUR menjadi salah satu instrumen intervensi yang efektif untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM.⁹

Lebih lanjut, Pangeran menekankan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah berperan sebagai faktor kunci dalam menarik investasi di daerah (Pangeran, 2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat dapat meningkatkan daya tarik investasi, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah tidak hanya berfokus pada dukungan langsung kepada pelaku usaha, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Intervensi pemerintah dalam ekonomi mikro juga dapat dilihat dari sudut pandang mitigasi guncangan ekonomi. Mutoni menjelaskan bahwa intervensi pemerintah dapat membantu mengurangi dampak negatif dari guncangan ekonomi, seperti krisis keuangan atau bencana alam. Dengan menerapkan kebijakan yang responsif dan adaptif, pemerintah dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha untuk bertahan dan pulih dari situasi sulit.¹⁰

Namun, penting untuk diingat bahwa intervensi pemerintah tidak selalu

⁹ Anjani, W. and Purnamasari, V. (2023). *Analisis faktor yang mempengaruhi minat pengajuan kur super mikro pada masa pandemi covid-19*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 28(1), 98-112.

¹⁰ Mutoni, K. (2024). The role of government intervention in mitigating economic shocks. *International Journal of Economic Policy*, 4(2), 14-26.

berjalan mulus. Terdapat risiko bahwa intervensi yang berlebihan dapat menyebabkan distorsi pasar dan mengurangi efisiensi ekonomi. Wu dan Wang mengemukakan bahwa intervensi administratif harus diminimalkan, tetapi tetap diperlukan untuk mengelola ekonomi dengan baik. Oleh karena itu, keseimbangan antara intervensi dan kebebasan pasar menjadi kunci dalam mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan.¹¹

Dalam konteks global, intervensi pemerintah juga berperan dalam memastikan keamanan pangan dan keberlanjutan ekonomi. menunjukkan bahwa intervensi pemerintah yang moderat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari jebakan regulasi yang dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan (Zhang et al., 2021). Hal ini menyoroti pentingnya pendekatan yang seimbang dalam merancang kebijakan intervensi.¹²

Kebijakan intervensi pemerintah juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana kebijakan tersebut diterapkan. Pycroft mencatat bahwa intervensi pemerintah dalam konteks sosial, seperti penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, intervensi pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.¹³

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan,

¹¹ Wu, L. and Wang, C. (2022). Research on rural environmental pollution control path under administrative intervention mechanism. *Ecological Chemistry and Engineering S*, 29(3), 391-402.

¹² Zhang, dkk (2021). Does government intervention ensure food safety? evidence from china. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(7), 3645.

¹³ Pycroft, C. (2000). Democracy and delivery: the rationalization of local government in south africa. *International Review of Administrative Sciences*, 66(1), 143-159.

pemerintah perlu menerapkan pendekatan yang holistik dalam intervensi ekonomi. Jnawali menekankan bahwa intervensi yang efektif harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dinamika sosial dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dengan memahami konteks yang lebih luas, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih responsif dan efektif.¹⁴

Sebagai kesimpulan, intervensi pemerintah dalam ekonomi mikro merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Melalui berbagai kebijakan, termasuk perpajakan, bantuan langsung, dan akses pembiayaan, pemerintah dapat memainkan peran sentral dalam mendukung UMKM dan mendorong pemulihan ekonomi. Namun, intervensi ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari distorsi pasar dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

2.2.1 Teori Ekonomi Politik

Kata "ekonomi" pertama kali digunakan oleh filsuf Yunani Xenophone. Istilah ekonomi berasal dari suku kata Yunani OIKOS dan NOMOS (tindakan dalam mengejar kebutuhan). Pembangunan Ekonomi yang berarti pengaturan anggaran. Secara sederhana, ekonomi dapat diartikan sebagai aturan, peraturan, dan cara mengelola rumah tangga. Saat ini, ilmu yang mempelajari bagaimana rumah tangga dan masyarakat menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut ekonomi. Secara lebih luas, ekonomi diajarkan oleh Profesor J L Mey JR. Dengan kata lain, ekonomi adalah ilmu yang

¹⁴ Jnawali, H. (2022). Indian intervention in ethnic movement of nepal: did madheshi lose or gain?. *Ethnicities*, 23(2), 235-257.

mempelajari upaya mencapai kesejahteraan manusia Adam Smith mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan untuk mencapai tujuan tertentu Dari kedua definisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia, individu atau kelompok, dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan Kemakmuran adalah keadaan di mana semua kebutuhan material terpenuhi dengan sebaik-baiknya Seorang ekonom, di sisi lain, adalah seseorang yang menggunakan konsep dan data ekonomi dalam pekerjaan mereka.

Pendekatan ini menganggap ranah politik berada di bawah perekonomian dan menggunakan kerangka sistem politik untuk menganalisis instrumen ekonomi melalui instrumen kebijakan seperti mekanisme pasar, harga dan investasi, atau peristiwa ekonomi yang terjadi. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini, politik dianggap memberikan ruang bagi tindakan (a place of acting) sedangkan ekonomi merupakan sarana tindakan (a way of acting).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik. Hal ini karena penelitian dilakukan dalam kondisi alami dan menggambarkan strategi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM untuk membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah di Aceh Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memverifikasi dan mendeskripsikan realitas peristiwa yang diteliti, sehingga memudahkan memperoleh data yang obyektif.¹⁵

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi lokasi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM di Aceh Barat. Kedudukannya, Disperindangkop merupakan instansi pemerintah yang bertugas mengawasi dan membina koperasi usaha kecil dan menengah serta membantu pemerintah dalam menangani permasalahan perusahaan, koperasi, industri, dan pemerintah daerah pada bidang usaha kecil dan menengah.

¹⁵ Frederic Winston Nalle, 'Metode Penelitian Kualitatif', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2019, 35.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer dapat dipahami sebagai data yang dikumpulkan dari sumber primer atau langsung dari peneliti. Data primer biasanya diperoleh melalui kerja lapangan dan observasi langsung dengan menggunakan semua metode pengumpulan data yang umum. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui interaksi dengan narasumber. Alat yang digunakan yaitu alat tulis, alat perekam, dokumentasi.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada pemrosesan data primer dan mengungkapkannya dalam tabel dan gambar, atau mengumpulkannya dari tempat penyimpanan data dan membuatnya tersedia untuk umum. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau pengumpul data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui lembaga penelitian, buku akademik, informasi publikasi, dan literatur terkait penelitian.¹⁶

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang atau organisasi yang menyediakan data atau informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang mereka butuhkan dan berfungsi sebagai sumber data yang memberikan informasi faktual mengenai data yang diminta. Oleh sebab itu, terdapat 8 informan di dalam penelitian ini, seperti

¹⁶ Suprayogo, Imam, and Tobroni, 'Metodelogi Penelitian Agama', *Metodologi Penelitian*, 2014, p. 102.

yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Data Informan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1 Orang
2	Kepala Bidang Perizinan Dinas	1 Orang
3	Masyarakat/ Pelaku UMKM	6 Orang
Total		8 Orang

Sumber : Data di Olah Tahun 2024

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif adalah pengumpulan data yang mengklasifikasikan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta mendeskripsikan data dalam bentuk gejala.

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan metode kualitatif. Observasi merupakan kegiatan yang menggunakan panca indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian. Hasil suatu pengamatan dapat berupa suatu kegiatan, peristiwa, peristiwa, obyek, keadaan atau suasana hati tertentu, atau emosi manusia. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran realistik terhadap suatu peristiwa atau lebih dan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Observasi partisipatif adalah metode pengumpulan data dengan peneliti berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari informan dan mengumpulkan data penelitian melalui observasi dan persepsi.
2. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi. Peneliti mendasarkan pengamatannya pada apa yang terjadi di lapangan.
3. observasi kelompok adalah yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi atau percakapan antara peneliti dan informan untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai pertanyaan dan topik yang diangkat dalam penelitian. Wawancara dimulai dengan pertanyaan terstruktur, beberapa di antaranya terstruktur dan disusun secara cermat untuk mengumpulkan data. Kemudian dengan mulai mencari informasi lebih lanjut dan lambat laun pengetahuan akan semakin mendalam. Dengan pedoman pertanyaan yang dikembangkan diharapkan dapat membantu pewawancara lebih memfokuskan pertanyaan dan pernyataannya serta memudahkan dalam merangkum catatan hasil pengumpulan data penelitian.¹⁷

3.5.3 Dokumen

Dokumentasi adalah seni mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen, seperti arsip, yang berisi kumpulan pendapat, catatan harian, jurnal, artikel, surat,

¹⁷ Muhammad Rivki and others, *Metode Penelitian Kualitatif*.

laporan teori, proposal, atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi mengacu pada pengetahuan dan bukti yang diperoleh peneliti ketika melakukan teknik wawancara dan observasi. Misalnya saja dalam bentuk dokumentasi fotografi.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan model Milles & Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjelasan ketiga tahapan tersebut antara lain sebagai berikut :

3.6.1 Reduksi data

Reduksi data meliputi pengelompokan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Reduksi data diartikan sebagai proses selektif dalam menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data yang diperoleh dari catatan lapangan tertulis. Pengurangan data terjadi terus menerus sepanjang penelitian. Ketika pengumpulan data sedang berlangsung, langkah selanjutnya adalah reduksi atau peringkasan. Reduksi data terus berlanjut bahkan setelah kerja lapangan.

Reduksi data adalah bagian dari analisis dan merupakan suatu bentuk pengorganisasian data sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dengan memilah, menyelesaikan, dan membuang data yang berlebihan.

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi terorganisir yang memberikan kemampuan untuk menarik kesimpulan. Penyajian yang baik seperti grafik, jaringan, dan diagram yang dirancang untuk menyatukan informasi terorganisir dalam format yang mudah diakses adalah alat paling penting dalam analisis kualitatif yang baik. Tahap pengumpulan data merupakan tahap data diorganisasikan dan diolah sehingga dapat diambil kesimpulan.

3.6.3 Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah menafsirkan data penelitian. Setelah mengorganisasikan dan menyajikan data, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan/penilaian berdasarkan fenomena yang diamati. Kesimpulan juga dikonfirmasi selama penelitian. Keaslian data yang diperoleh harus diverifikasi. Proses pengumpulan data tidak hanya memerlukan pencapaian suatu kesimpulan akhir, namun juga peninjauan kembali untuk mendapatkan pemahaman yang sebenarnya.¹⁸

¹⁸ Ahmad and Muslimah, 'Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif', *Proceedings*, 1.1 (2021), pp. 173–86.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian penulis adalah Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang pengembangan dan pengawasan sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Tanggung jawabnya mencakup perumusan kebijakan, pengembangan struktur, dan pemberian pelatihan serta dukungan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan dunia usaha di daerah. Dinas ini juga bertanggung jawab untuk mempromosikan produk lokal dan menciptakan lingkungan bisnis yang menguntungkan.

Dasar hukum pembentukan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat adalah Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Barat merupakan lembaga induk Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Barat

melalui Sekretaris Daerah.

1. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur
2. Kelembagaan

Susunan organisasi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha

Kecil dan menengah Kabupaten Aceh Barat selengkapnya dijelaskan berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan;
 - b. Seksi Bina Usaha Perdagangan; dan c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
4. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Industri;
 - b. Seksi Pengembangan Aneka Kerajinan; dan
 - c. Seksi Bina Usaha Perindustrian.
5. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - b. Seksi Pengawasan Koperasi; dan
 - c. Seksi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. UPTD.

4.1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kepala Dinas bertanggung jawab mengelola penyelenggaraan administrasi publik, perencanaan dan evaluasi sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1 Pengembangan, pengelolaan dan koordinasi usaha kecil dan menengah
- 2 Pengelolaan dan pengendalian urusan masyarakat
- 3 Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja formal
- 4 Pengembangan dan pemberdayaan kolaboratif
- 5 Kepemimpinan, pengelolaan dan pengembangan industri dan dunia usaha
- 6 Mengembangkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- 7 Melaksanakan koordinasi dengan otoritas dan/atau organisasi lain yang berwenang di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, industri, dan perdagangan
- 8 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati Ache Barat tergantung bidang pekerjaannya.

Sekretariat bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan administrasi, kepegawaian, dokumentasi, sarana usaha, infrastruktur, dan pelaksanaan reformasi fiskal dan birokrasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian,

kearsipan, kepastakaan, kerumahtanggaan, dan kehumasan;

3. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja;
4. Pengoordinasian penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
5. Penyelenggaraan ketatausahaan keuangan dan perlengkapan; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang kerja dan tugas
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertanggung jawab mengelola pelayanan administrasi, sumber daya manusia, pencatatan, struktur kerja dan infrastruktur. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan;
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
3. Pelaksanaan kegiatan protokoler dan hubungan masyarakat;
4. Melakukan pencatatan dan pemeliharaan.
5. Melakukan pemeliharaan sistem kerja dan infrastruktur; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pekerjaan dan yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Program dan Keuangan bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengelola, mengevaluasi dan melaporkan rencana kerja dan anggaran, serta memelihara pengendalian keuangan.

Subbagian program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan rencana kerja dan penyusunan tugas
2. Melakukan penganggaran
3. Melakukan persiapan fisik dokumen Akip
4. Penyelesaian hasil post test
5. Penerapan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai jabatannya.

Bidang Perdagangan bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan di bidang perizinan dan registrasi perdagangan, struktur distribusi komersial, stabilitas harga barang-barang penting dan esensial, pengembangan ekspor dan perlindungan konsumen.

Bidang perdagangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Mengkoordinasikan dan mempromosikan rekomendasi pengelolaan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan supermarket.
2. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha dan Gudang, Surat Keterangan Gudang Barang (SKPB), Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dan merekomendasikan penerbitan Pkapt dan laporan normalisasi perdagangan kayu atau pulau.
3. Inspeksi fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan berbahaya, kemasan dan label bahan berbahaya.
4. Menerbitkan surat keterangan asal (untuk daerah yang ditunjuk sebagai otoritas penerbit surat keterangan asal).
5. Membangun dan mengelola fasilitas distribusi komersial dan melatih

manajer pengelola distribusi komersial.

6. Memantau dan mengendalikan ketersediaan barang-barang penting dan kritis di tingkat daerah.
7. Memantau permintaan dasar dan harga serta inventaris barang-barang penting di tingkat pasar kabupaten.
8. Menerapkan langkah-langkah pemasaran untuk menstabilkan harga pangan pokok lokal.
9. Pemantauan pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten selama pengumpulan, distribusi dan penggunaan pupuk tambahan di lokasi konstruksi.
10. Mengkoordinasikan praktik perdagangan dan mempromosikan citra produk ekspor yang berkualitas.
11. Penerapan parameter hukum berupa identifikasi, deteksi dan pemantauan.
12. Pelaksanaan tugas-tugas resmi yang ditentukan oleh komandan militer sehubungan dengan tugas-tugas lainnya.

Seksi Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penataan dan pengelolaan sarana perdagangan, pengawasan, pengendalian distribusi barang dan perizinan perdagangan.

Seksi Sarana Distribusi Perdagangan bertanggung jawab atas organisasi dan pemeliharaan fasilitas perdagangan, pengawasan dan pengelolaan distribusi produk dan izin perdagangan.

Seksi Sarana Distribusi Perdagangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi:

1. Pengembangan dan pemeliharaan sistem pelaksanaan usaha

2. Mengkoordinasikan dan mempromosikan rekomendasi izin pengelolaan izin usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan supermarket.
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerbitan Daftar Usaha, Daftar Gudang, dan Surat Keterangan Gudang (SKPB).
4. Pelaksanaan dan pengelolaan penerbitan surat keterangan asal;
5. Melaksanakan rekomendasi Pkapt dan melaporkan repatriasi kayu dan perdagangan pulau.
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai jabatannya.

Seksi Bina Usaha Perdagangan bertugas mengembangkan pedagang dan pasar tradisional serta memantau dan mengelola kebutuhan pokok dan barang-barang penting. Seksi Bina Usaha Perdagangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan pengembangan komersial dan memelihara fasilitas distribusi komersial di wilayah kerja.
2. Menerapkan langkah-langkah pasar untuk menstabilkan harga pangan pokok kabupaten.
3. Memantau dan mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan kritis di tingkat kabupaten.
4. Mempromosikan perdagangan produk ekspor bernilai tambah tinggi dan melakukan operasi perdagangan.
5. Melaksanakan kampanye promosi produk ekspor yang berkualitas di tingkat lokal (tingkat kabupaten/kota), dan

6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pekerjaan dan yang diberikan oleh atasan.

Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bertanggung jawab atas fungsi-fungsi seperti pengawasan, pengaturan pasar, perlindungan konsumen, dan pemeliharaan ketertiban perdagangan. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Memantau harga dan ketersediaan barang-barang penting dan kritis di tingkat pasar kabupaten.
2. Melakukan pemantauan pupuk dan pestisida di tingkat daerah dalam pengadaan, pendistribusian dan penggunaan pupuk tambahan.
3. Inspeksi gudang bahan berbahaya dan pemantauan pengiriman, penanganan, dan pelabelan bahan berbahaya
4. Memperkenalkan instrumen hukum dalam bentuk langkah-langkah pemantauan dan pengawasan yang baru.
5. Melakukan koordinasi dan promosi Surat Pendaftaran Waralaba (STPW).
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai jabatannya.

Bidang Perindustrian bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan dan mengelola perizinan dan informasi untuk Daerah Kabupaten.

Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian dalam pendefinisian rencana pengembangan

industri daerah.

2. Mengkoordinasikan pemberian IUI kecil hingga menengah.
3. Konsolidasi pemberian IPUI kepada usaha kecil dan menengah.
4. Melaksanakan koordinasi penempatan IUKI dan IPKI di wilayah Kabupaten.
5. Memelihara dan melaporkan informasi mengenai industri yang dikelola di Kabupaten oleh IUL dan izin terbarukan terkait, IUKI dan IPKI.
6. Melakukan konsultasi, pengembangan dan peningkatan produksi usaha kecil dan menengah.
7. Melakukan pendataan dan pemetaan industri besar
8. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri.
9. Melaksanakan tugas resmi lainnya yang ditentukan oleh dinas tergantung pada wilayah operasinya.

Seksi Pengembangan Industri bertanggung jawab untuk melaksanakan orientasi, pengembangan, pengumpulan data dan pemetaan industri-industri utama.

Seksi Pengembangan Industri dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan penyesuaian dalam pendefinisian rencana pengembangan industri daerah.
2. Pelaksanaan pendataan dan pemetaan industri prioritas;
3. Penyusunan tata ruang kawasan industri terintegrasi;
4. Pelaksanaan fasilitasi akses kerja sama dan kemitraan pengembangan

industri;

5. Melaksanakan pemantauan dan pengelolaan Izin Kawasan Industri (IUKI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Industri (IUI).
6. Melaksanakan tugas lain sesuai jabatan yang diarahkan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Aneka Kerajinan mempunyai tugas membina, mengembangkan dan meningkatkan produksi aneka kerajinan tangan.

Seksi Pengembangan Aneka Kerajinan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Aneka Kerajinan
2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
3. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan peningkatan produksi Industri Kecil dan Menengah;
4. Pelaksanaan fasilitasi akses kerja sama dan kemitraan pengembangan Aneka kerajinan;
5. Mendorong akses permodalan bagi perbankan, lembaga keuangan non-bank dan sektor ekonomi lainnya, dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pekerjaannya.

Seksi Bina Usaha Perindustrian bertanggung jawab atas arahan, pengembangan dan peningkatan produksi perusahaan industri.

Seksi Bina Usaha Perindustrian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Implementasi UI untuk UKM, cara penerbitan IPUI (UKI dan IPKI di wilayah Kabupaten).
2. Mengelola dan melaporkan informasi mengenai pelaksanaan IUL dan perpanjangan izin, serta IUKI dan IPKI di wilayah Kabupaten.
3. Pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan usaha
4. Membangun kewirausahaan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah
5. Mempermudah akses permodalan bagi perbankan, lembaga keuangan non-bank dan sektor perekonomian lainnya.
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai jabatannya.

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, serta pemberdayaan usaha kecil menengah, dan usaha mikro.

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Pengelolaan penerbitan izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan cabang simpan pinjam, cabang, dan loket kas
2. Melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan terhadap koperasi dan koperasi simpan pinjam/koperasi simpan pinjam.
3. Melakukan evaluasi kesehatan koperasi simpan pinjam/koperasi simpan pinjam (koperasi KSP/USP).
4. Mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan kolaboratif dengan disiplin

ilmu terkait di daerah.

5. Memperkuat dan melindungi koperasi dan usaha kecil dan menengah
6. Penyelenggaraan pengembangan usaha kecil dan menengah yang bertujuan untuk memperluas cakupan perusahaan menjadi usaha kecil dan menengah.
7. Mempromosikan kerjasama antara usaha kecil dan menengah dan perusahaan lainnya.
8. Koordinasi Pendataan, Perizinan Usaha Kecil (UMK)
9. Melaksanakan tugas resmi lainnya yang diberikan oleh komandan militer, tergantung pada wilayah operasinya.

Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan koperasi, pembinaan kerjasama dan kemitraan, pendidikan dan pelatihan Koperasi.

Seksi Kelembagaan Koperasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Praktek organisasi koperasi dan pengembangan organisasi.
2. Mengelola distribusi izin simpan pinjam komersial kepada koperasi di lokasi anggota dalam wilayah kabupaten.
3. Mengelola penerbitan dan administrasi izin pembukaan cabang, kantor cabang dan pengolahan kas asosiasi simpan pinjam di wilayah anggota kabupaten.
4. Menyelenggarakan pelatihan koperasi dan pelatihan tambahan bagi koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten
5. Pengenalan sistem kemitraan antara koperasi dan unit ekonomi lainnya, dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pekerjaan dan

yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawasan Koperasi melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap perkumpulan simpan pinjam/koperasi (koperasi KSP/USP).

Seksi Pengawasan Koperasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Mengawasi dan mengendalikan koperasi yang wilayah kesatuannya ada di daerah.
2. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perkumpulan simpan pinjam dan perkumpulan simpan pinjam (koperasi KSP/USP) di wilayah terkait.
3. Peringkat kredit tabungan dan credit union/unit tabungan
4. Pinjaman Koperasi (koperasi KSP/USP).
5. Praktik pemberdayaan dan perlindungan kolaboratif.
6. Mendorong akses permodalan dari bank, lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan lainnya.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan sebagaimana mestinya oleh atasan.

Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM).

Seksi Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi:

1. Mengembangkan kapasitas UKM dan usaha mikro melalui penguatan kelembagaan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

2. Bertujuan untuk mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah dan memperluas kapasitas usaha mereka sehingga mereka dapat bangkit kembali sebagai usaha kecil dan menengah.
3. Mendorong kerjasama dengan usaha kecil dan menengah serta dunia usaha lainnya dan melaksanakan penyelesaian sengketa dengan mitra keuangan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah.
4. Peningkatan kapasitas UKM melalui pendataan dan perizinan.
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMK) dan UMK.
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai jabatannya.

Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas (UPTD) bertugas melaksanakan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional banyak orang di tingkat fungsional dibagi ke dalam kelompok berbeda berdasarkan bidang keahliannya. Sekelompok spesialis fungsional bertugas melakukan tugas fungsional tertentu berdasarkan pengetahuan dan keterampilan khusus.

b. Sumber Aparatur

Pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat tahun 2023 memiliki pegawai sebanyak 64 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PIS) 64 orang, Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) 16 orang.

4.1.3 Visi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat

Visi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat adalah : "Terwujudnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Peran Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan"

Visi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh Barat bertujuan untuk lebih memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Aceh Barat melalui penguatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi ini memandang Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai kekuatan yang kuat dan mandiri untuk pertumbuhan ekonomi, daya saing, kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat.

4.1.4 Misi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat.

Misi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat berkaitan erat dengan misi Kabupaten Aceh Barat, namun misi tersebut lebih fokus kepada aspek peningkatan perekonomian daerah yang antara lain sebagai berikut:

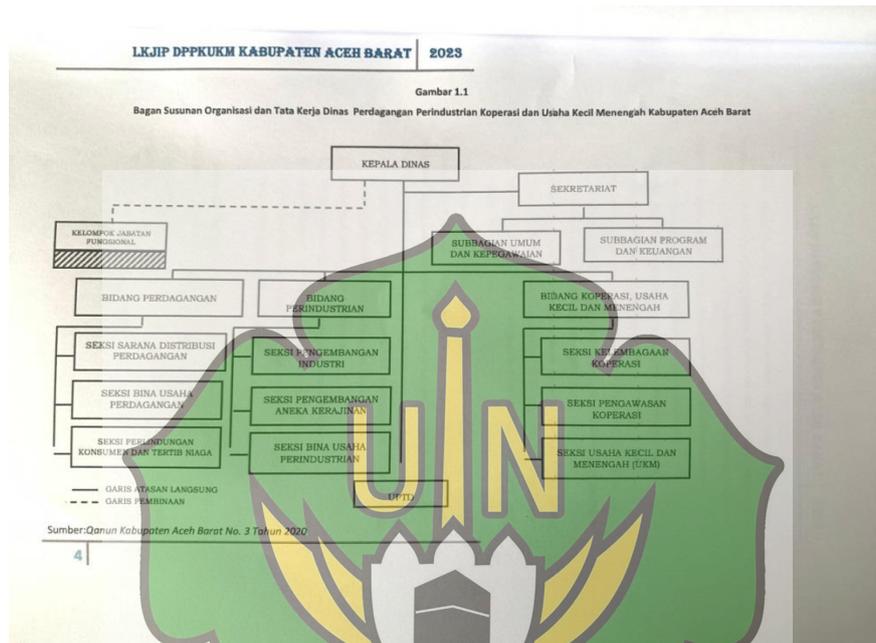
- 1) Pengembangan struktur dan infrastruktur distribusi perdagangan (pasar tradisional/modern). Bertujuan untuk menjamin kelangsungan usaha bagi pemilik usaha kecil dan pedagang kaki lima dengan memberikan peluang

usaha yang memadai bagi para pedagang;

- 2) Memperkuat usaha kecil dan menengah dan koperasi melalui pelatihan, konsultasi, pembinaan dan dukungan permodalan/peralatan usaha. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui upaya pengembangan industri dan meningkatkan kegiatan usaha tradisional dan modern, termasuk penguatan sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas organisasi korban konflik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian lokal untuk mengurangi angka kemiskinan terkait konflik, sebagaimana dituangkan dalam misi ke dua untuk wilayah Aceh Barat;
- 3) Mendorong partisipasi BUMD, BUMN dan swasta dalam pemerintahan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat akan bertindak sebagai koordinator untuk memperkuat daya saing Barat dan mempercepat pembangunan daerah melalui kegiatan kerjasama dan investasi;
- 4) Pengembangan industri berorientasi ekspor berbasis pertanian, Industri kecil dan Rumah Tangga. Tujuannya adalah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi regional dengan meningkatkan daya saing produk-produk berkualitas yang berkelanjutan;
- 5) Menciptakan peluang pasar bagi UKM melalui keterkaitan usaha dan memperkuat kinerja koperasi sebagai entitas ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah, menyediakan infrastruktur pendukung, meningkatkan peluang usaha dan perlindungan konsumen, serta menjadikan kota

Meulaboh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

4.1.5 Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat.



Data diperoleh dari Dinas

4.2 Pembahasan

4.2.1 Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Pengembangan UMKM di Tengah Pengaruh Dinamika Politik Lokal dan Nasional

Secara umum, UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini merujuk pada usaha-usaha yang berdasarkan ukuran dan omsetnya. Dengan memainkan peran penting dalam perekonomian, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks perekonomian inklusif, hal ini

berarti membangun sistem di mana setiap orang, termasuk kelompok marginal, dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini termasuk mendukung UMKM melalui pendidikan, pelatihan, dan akses yang lebih adil terhadap keuangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan dan membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Strategi pemerintah sangat penting bagi pengembangan UMKM dikarenakan dukungan pemerintah memberikan akses pembangunan yang setara bagi pengusaha dari berbagai latar belakang, termasuk perempuan. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab mengembangkan kebijakan dan program berupa program pelatihan dan pemberdayaan, termasuk perluasan akses pasar. Pemerintah daerah Aceh Barat melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM. Dalam konteks ini, ada beberapa hal yang menjadi fokus utama:

1. Pemberdayaan dan Pelatihan UMKM

Pemberdayaan dan pelatihan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, serta aksesibilitas UMKM terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan usahanya. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan pemilik usaha dan masyarakat sekitarnya.

Berikut ini pernyataan terkait dengan program pelatihan dan pemberdayaan oleh kabid ukm dinas perdagangan perindustrian koperasi dan ukm aceh barat menjelaskan bahwa:

“Menurut saya pemerintah sangat-sangat membantu para pelaku ukm ini baik berupa Program pelatihan dan pemberdayaan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan agar para pelaku ukm dapat mengelola usaha secara efisien dan efektif. Dimana program ini bertujuan untuk membantu para pelaku ukm baik dalam pemasaran, legalitas, dan pendampingan. Pemerintah juga berperan dalam memberikan dorongan terhadap para pelaku ukm dengan adanya pemanfaatan teknologi digital yang bisa digunakan sebagai media untuk memperkenalkan produk-produk dan bisa digunakan sebagai contoh untuk mengikuti perkembangan baik dalam pemasaran produk, sehingga ukm dapat menjangkau pasar yang lebih luas serta menyediakan pelatihan yang focus pada keterampilan agar pelaku ukm ini dapat mengelola usaha dengan baik.”¹⁹

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat secara rutin melakukan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan UMKM. Penting untuk meningkatkan daya saing UKM di pasar lokal dan global, terutama ketika menghadapi tantangan ekonomi yang dipengaruhi oleh dinamika politik di tingkat lokal dan nasional. Program-program ini sering kali bekerja sama dengan lembaga pendidikan, pemerintah provinsi, dan lembaga swasta.

Pemberdayaan UMKM mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan posisi UMKM dalam ekonomi. Hal ini melibatkan peningkatan kemampuan manajerial, akses terhadap pembiayaan, pasar, teknologi, serta penyuluhan mengenai hak-hak hukum dan regulasi yang terkait dengan bisnis. Pemberdayaan juga berarti memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk berkembang secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada pihak eksternal.

Contoh kegiatan pemberdayaan UMKM meliputi:

¹⁹ Wawancara dengan responden kabid dinas perdagangan perindustrian koperasi dan ukm aceh barat

- Akses Pembiayaan: Membantu UMKM untuk mendapatkan modal usaha melalui berbagai program pembiayaan dengan bunga rendah atau tanpa jaminan.
- Penguatan Jaringan: Membangun jaringan antara UMKM dengan pihak lain seperti pemasok, distributor, dan bahkan konsumen melalui koperasi atau asosiasi.
- Pengembangan Kapasitas: Melibatkan UMKM dalam program-program yang meningkatkan kapasitas usaha, baik dalam manajerial, produksi, maupun pemasaran.

Pelatihan untuk UMKM adalah salah satu bagian penting dari pemberdayaan. Program pelatihan dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM dalam berbagai aspek usaha, seperti manajemen bisnis, pemasaran, keuangan, dan teknologi.

Jenis pelatihan yang biasanya diberikan antara lain:

- Pelatihan Manajemen Keuangan: Agar pelaku UMKM dapat mengelola keuangan dengan baik, mencatat transaksi dengan tepat, dan memisahkan keuangan pribadi dengan usaha.
- Pelatihan Pemasaran Digital: Mengajarkan pelaku UMKM cara memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk mereka secara online, menggunakan media sosial atau marketplace.
- Pelatihan Pengembangan Produk: Membantu UMKM dalam menciptakan produk yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.
- Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial: Meningkatkan keterampilan

kepemimpinan bagi pemilik UMKM untuk dapat memimpin tim dan mengambil keputusan bisnis yang strategis.

Dengan adanya pemberdayaan dan pelatihan, UMKM dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas, sehingga mereka lebih mampu bertahan dan berkembang di pasar yang semakin kompetitif. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta sering kali berperan aktif dalam menyelenggarakan program-program ini.

2. Penyediaan Akses Pembiayaan

Pemerintah daerah berupaya memberikan lebih banyak akses terhadap pembiayaan bagi usaha kecil melalui dana daerah, program pinjaman yang dikelola bank, atau program pembiayaan koperasi. Dalam konteks dinamika politik, kebijakan fiskal seringkali dipengaruhi oleh keputusan politik pemerintah daerah dan kebijakan fiskal nasional. Penyediaan akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu aspek krusial dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Akses terhadap pembiayaan yang mudah dan terjangkau memungkinkan UMKM untuk memperluas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki manajemen keuangan, serta mengembangkan inovasi produk dan layanan.

Berikut penjelasan lanjutan dengan kbid bidang ukm dinas perdagangan, perindustrian, koperasi dan ukm aceh barat menjelaskan bahwa:

“Pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk mendukung umkm dalam menyediakan lapak-lapak dan juga mengadakan expo atau bazar yang dapat digunakan sebagai wadah untuk memperkenalkan produk-produk lokal. Melalui berbagai program seperti penyediaan tempat, pendanaan yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas produk dan memperluas jaringan pemasaran produk. Expo ini tidak hanya menjadi ajang promosi, akan tetapi

juga sebagai platform untuk berkolaborasi dan berinovasi antar para pelaku umkm. Sehingga diharapkan dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal dan nasional”.²⁰

Dalam konteks UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), Expo merujuk pada pameran atau event yang diselenggarakan untuk memperkenalkan produk atau jasa dari berbagai pelaku usaha. Expo UMKM bertujuan untuk memberikan platform bagi para pelaku UMKM agar dapat mempromosikan bisnis mereka, menjalin jaringan, dan menemukan peluang pasar baru.

Event seperti ini sering kali diadakan dalam bentuk pameran fisik atau virtual, yang memungkinkan UMKM untuk:

Menampilkan Produk atau Jasa: UMKM dapat memperkenalkan produk mereka kepada audiens yang lebih luas, termasuk calon pelanggan, mitra bisnis, atau investor.

- Meningkatkan Jaringan: Melalui Expo, UMKM bisa bertemu dengan pelaku bisnis lain, memperluas jaringan bisnis, dan menjalin kemitraan strategis.
- Mendapatkan Peluang Pembiayaan: Expo juga bisa menjadi tempat bagi UMKM untuk bertemu dengan lembaga keuangan atau investor yang bisa mendukung pendanaan usaha.
- Mengakses Pelatihan dan Sumber Daya: Beberapa expo UMKM juga menyertakan sesi pelatihan atau seminar yang memberikan wawasan tentang cara mengelola bisnis, pemasaran, atau teknologi terkini.

Secara umum, Expo dalam konteks UMKM adalah kesempatan penting bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang dan dikenal lebih luas di pasar.

²⁰ Wawancara dengan responden kabid ukm dinas perdagangan perindustrian koperasi dan ukm aceh barat

Berikut hasil wawancara dengan kabid ukm dinas perdagangan, perindustrian, koperasi dan ukm aceh barat

“kami berharap masyarakat lebih dapat berkomunikasi kepada pemerintah terutama dengan dinas-dinas sehingga kami lebih mengetahui apa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh para pelaku usaha sehingga kami bisa membantu nya”²¹

Pentingnya Akses Pembiayaan untuk UMKM

UMKM sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses pembiayaan yang memadai karena keterbatasan sumber daya, kurangnya jaminan, serta rendahnya pengetahuan tentang produk keuangan yang ada. Tanpa dukungan pembiayaan, banyak UMKM yang kesulitan untuk berkembang atau bahkan bertahan di pasar yang kompetitif. Akses pembiayaan ini dapat datang dalam berbagai bentuk, baik melalui sumber pendanaan dari lembaga keuangan formal (bank, lembaga pembiayaan), maupun alternatif lainnya, seperti lembaga non-bank, atau bahkan program bantuan pemerintah.

3. Kebijakan Pemerintah dalam Infrastruktur dan Regulasi

Pembangunan infrastruktur yang tepat, seperti penghubung jalan raya, pusat distribusi dan pasar digital, akan mendorong perkembangan UMKM. Untuk mempermudah usaha kecil, Pemerintah Aceh Barat dapat mengubah kebijakan perizinan dan peraturan usahanya. Namun, perubahan kebijakan tersebut seringkali bergantung pada pengaruh kebijakan pemerintah pusat dan dinamika politik dalam nasional.

Berikut penjelasan dengan ketua bidang perizinan dinas perdagangan, perindustrian, koperasi dan ukm aceh barat

²¹ Wawancara dengan responden kabid ukm dinas perdagangan perindustrian koperasi dan ukm aceh barat

"Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyadari bahwa infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional UMKM. Salah satu langkah yang kami ambil adalah pengembangan infrastruktur transportasi dan distribusi, seperti peningkatan kualitas jalan, pasar, dan akses pelabuhan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM lebih mudah dijangkau oleh pasar yang lebih luas, baik lokal, maupun nasional. Selain itu, kami juga fokus pada pengembangan infrastruktur digital, seperti penyediaan akses internet yang lebih luas dan pelatihan digital bagi pelaku UMKM. Kami berharap dengan adanya infrastruktur digital yang baik, pelaku UMKM di Aceh Barat bisa mengakses pasar online, meningkatkan daya saing produk, serta memperluas jaringan pemasaran secara global."²²

Kebijakan pemerintah terkait infrastruktur dan regulasi memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Infrastruktur yang baik dan regulasi yang mendukung dapat mempercepat akses UMKM ke pasar, pembiayaan, teknologi, serta meminimalkan hambatan-hambatan yang ada dalam menjalankan usaha.

Infrastruktur merujuk pada berbagai fasilitas dasar yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi, seperti jalan, jembatan, sistem transportasi, energi, air bersih, serta jaringan komunikasi dan informasi. Pemerintah berperan dalam membangun dan memelihara infrastruktur ini untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi pelaku UMKM.

4. Pemanfaatan Potensi Lokal dan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan potensi lokal dan sumber daya alam (SDA) merupakan strategi yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks pengembangan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). Potensi lokal dan SDA mengacu pada berbagai kekayaan alam dan budaya yang ada di

²² Wawancara dengan responden kapid perizinan dinas perdagangan perindustrian koperasi dan ukm aceh barat

suatu wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan usaha. Dengan memanfaatkan potensi ini, UMKM dapat meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

Infrastruktur digital merujuk pada seluruh elemen teknologi yang memungkinkan penyediaan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta layanan yang mendukung komunikasi dan pertukaran data dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk bisnis, pemerintahan, dan pendidikan. Infrastruktur digital sangat penting dalam mendukung transformasi digital, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi. Seperti Platform dan Aplikasi yaitu Perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk beroperasi dalam dunia digital, seperti aplikasi bisnis, platform e-commerce, tokopedia, shopee, tiktok dan sistem manajemen informasi, dan lainnya.

Aceh Barat mempunyai potensi besar dibidang pemanfaatan produk lokal seperti kue khas tradisional, produk kerajinan tangan, dan potensi di bidang pertanian, perikanan dan industri yang memanfaatkan sumber daya alam.

Selanjutnya wawancara dengan Nur sebagai pelaku usaha kue tradisional aceh :

“Usaha yang sedang dijalankan lebih kurang 5 tahun. Saya menerima bantuan modal berupa dana dari program pemerintah yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Bantuan ini saya gunakan untuk memperluas stok barang dan membeli peralatan usaha yang lebih modern. Dengan adanya bantuan ini sangat membantu saya dalam membuat kue atau memproduksi kue.”²³

²³ Wawancara dengan responden pelaku umkm

Berikut Wawancara dengan masyarakat pekerja disalah satu usaha dengan nama responden pelaku usaha laundry menjelaskan bahwa :

“Saya mendapatkan bantuan modal berupa pinjaman modal dari program pemerintah untuk UMKM dari dinas koperasi dan ukm. Bantuan ini saya gunakan untuk membeli mesin cuci dan pengering baru serta memperbaiki tempat usaha agar lebih nyaman bagi pelanggan.”²⁴

Pemerintah daerah fokus mengembangkan UMKM untuk mewujudkan potensi daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar daerah. Dukungan politik yang kuat terhadap sektor ini sangat penting bagi keberlanjutan program UKM berbasis komoditas lokal.

5. Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Nasional

Mengingat dinamika politik lokal dan nasional, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berupaya bekerja sama dengan pemerintah provinsi Aceh dan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan keuangan guna mempercepat pengembangan UMKM. Dalam konteks ini, keterkaitan antara kebijakan politik daerah dan kebijakan nasional untuk mendukung UMKM akan memperkuat daya saing UMKM di daerah.

Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah nasional sangat penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kedua tingkat pemerintahan ini memiliki peran masing-masing namun saling melengkapi, dengan tujuan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi UMKM agar dapat berkembang dan bersaing di pasar domestik maupun

²⁴ Wawancara dengan responden pelaku ukm

internasional.

Pemerintah nasional, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) serta lembaga lainnya, memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, memberikan regulasi yang mendukung, serta menyediakan berbagai program dan dukungan yang dapat diakses oleh UMKM di seluruh Indonesia. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk UMKM antara lain:

Kebijakan Pembiayaan

-Kredit Usaha Rakyat (KUR): Program pembiayaan dengan bunga rendah dan tanpa agunan untuk membantu UMKM mendapatkan akses modal. Pemerintah pusat menyediakan anggaran untuk KUR yang kemudian disalurkan melalui bank-bank pemerintah dan swasta yang berpartisipasi.

-Program Bantuan dan Subsidi Bunga: Pemerintah memberikan subsidi bunga dan hibah kepada UMKM untuk meringankan biaya operasional dan meningkatkan daya saing.

Regulasi yang Mendukung

-Undang-Undang UMKM: Pemerintah pusat menyusun dan menetapkan peraturan yang melindungi dan mendukung pertumbuhan UMKM, termasuk peraturan mengenai pembiayaan, pajak, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan usaha.

-Penyederhanaan Perizinan: Kebijakan terkait dengan penyederhanaan proses perizinan untuk UMKM.

Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi

-Pemerintah pusat berfokus pada pengembangan infrastruktur yang mempermudah distribusi produk UMKM, termasuk sistem transportasi, logistik, dan digitalisasi.

-Penyediaan Platform Digital: Inisiatif untuk mendorong UMKM memanfaatkan teknologi digital dan e-commerce melalui program seperti Go Digital untuk mengakses pasar global.

6. Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi dan Digitalisasi

Di era digital, banyak UMKM yang berkembang pesat melalui platform online. Di mana teknologi memainkan peran besar dalam meningkatkan daya saing, efisiensi operasional, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penggunaan teknologi dan digitalisasi memungkinkan UMKM untuk berkembang lebih cepat, mengurangi biaya operasional, dan mencapai pelanggan di tingkat global. Pemanfaatan teknologi dalam UMKM bisa meliputi penggunaan perangkat lunak, aplikasi, platform digital, dan alat lainnya untuk meningkatkan berbagai aspek bisnis.

Pentingnya Teknologi dan Digitalisasi bagi UMKM dapat membuka akses Pasar yang Lebih Luas seperti E-commerce Platform digital seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada membuka peluang bagi UMKM untuk menjual produk mereka secara online, menjangkau pasar lebih luas, termasuk pasar internasional, tanpa perlu memiliki toko fisik. Dan Marketplace. UMKM bisa memanfaatkan marketplace untuk menjual produk, memasarkan barang dengan lebih efisien, dan memperluas jangkauan pasar tanpa investasi besar dalam distribusi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat mendukung pengembangan ini dengan meningkatkan akses internet dan memberikan pelatihan digital kepada UMKM. Di sisi lain, kebijakan nasional mengenai digitalisasi UKM dapat mempengaruhi perkembangan UMKM di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, strategi pengembangan UMKM di Aceh Barat sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada di tingkat lokal dan nasional. Pemerintah daerah harus menyelaraskan strategi mereka dengan kebijakan yang ada di tingkat provinsi dan nasional dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut mampu menjawab tantangan dan peluang masyarakat.

4.2.2 Efektifitas Program Pengembangan UMKM

Untuk menilai efektivitas strategi yang telah diterapkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Barat, perlu dilakukan analisis terhadap beberapa aspek, yaitu peningkatan kapasitas, akses pasar, akses pembiayaan, dan penguatan daya saing UMKM.

Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengusaha UMKM di Kabupaten Aceh Barat, sebagian besar merasa terbantu dengan adanya pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh Dinas. Pelatihan mengenai manajemen usaha dan pemasaran produk telah memberikan wawasan baru bagi mereka dalam mengelola usaha secara lebih profesional. Namun, masih ada beberapa pengusaha yang merasa bahwa pelatihan yang diberikan kurang aplikatif dan tidak cukup mendalam.

Akses Pasar Fasilitasi pemasaran produk melalui pameran dan platform digital memang telah memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Namun, meskipun beberapa pengusaha UMKM berhasil mendapatkan konsumen baru, tidak semua pengusaha mampu memanfaatkan peluang ini secara maksimal. Banyak dari mereka yang masih terbatas dalam hal pengetahuan tentang pemasaran digital dan cara memanfaatkan media sosial untuk promosi produk.

Akses Pembiayaan Program pemberian bantuan modal melalui koperasi dan lembaga keuangan mikro cukup efektif dalam memberikan solusi bagi UMKM yang kesulitan memperoleh modal. Namun, masih banyak pengusaha yang merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif untuk mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu, jumlah bantuan yang disalurkan juga belum mencakup seluruh kebutuhan modal UMKM, terutama untuk usaha yang lebih besar dan membutuhkan pembiayaan jangka panjang.

Penguatan Daya Saing UMKM Meskipun beberapa program yang diterapkan oleh Dinas telah membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing mereka, tantangan besar masih tetap ada, terutama dalam hal kualitas produk dan inovasi. Banyak produk UMKM di Aceh Barat yang masih tergolong konvensional dan kurang memiliki daya tarik di pasar yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap teknologi dan inovasi dalam produksi.

Kendala dalam Implementasi Strategi

Meskipun strategi yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Barat cukup baik, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya:

Sumber Daya Manusia yang Terbatas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM di Aceh Barat menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah dan kualitas tenaga pendamping yang dapat memberikan pelatihan dan bimbingan yang optimal bagi UMKM. Hal ini berdampak pada terbatasnya jangkauan program dan kualitas pelatihan yang diberikan.

Keterbatasan Dana Program-program pengembangan UMKM memerlukan dana yang besar, sementara anggaran yang tersedia terbatas. Ini menyebabkan tidak semua UMKM yang membutuhkan bantuan dapat dijangkau. Selain itu, pembiayaan yang disediakan sering kali hanya mencakup modal kecil dan jangka pendek, sementara UMKM membutuhkan dana yang lebih besar dan jangka panjang untuk ekspansi usaha.

Kurangnya Infrastruktur dan Teknologi Walaupun ada upaya untuk membangun infrastruktur yang mendukung, masih banyak daerah di Aceh Barat yang kekurangan fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan UMKM. Selain itu, kurangnya akses terhadap teknologi terkini juga menjadi kendala bagi pengusaha UMKM dalam berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Barat telah menerapkan berbagai strategi yang cukup efektif dalam pengembangan UMKM. Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti

keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan infrastruktur, kebijakan yang telah diambil tetap memberikan dampak positif bagi peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM di daerah ini.

Namun, untuk meningkatkan efektivitas strategi ini, perlu adanya perbaikan dalam beberapa hal, seperti peningkatan kualitas pelatihan, penguatan akses pasar digital, dan penyediaan modal yang lebih fleksibel. Selain itu, pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi harus terus ditingkatkan agar UMKM dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional.

4.2.4. Tantangan yang Dihadapi pelaku UMKM

1. Regulasi yang Berubah-ubah.

Perubahan regulasi merupakan salah satu tantangan terbesar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Perubahan kebijakan ini seringkali terjadi tanpa sosialisasi yang memadai sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku ekonomi. Ketidakpastian ini menyulitkan perencanaan strategi bisnis jangka panjang. Pelaku UMKM biasanya memiliki sumber daya keuangan dan pengetahuan yang terbatas, sehingga sulit bagi mereka untuk beradaptasi terhadap semua perubahan.

Selain itu, perubahan regulasi dapat berdampak pada akses pelaku UMKM terhadap berbagai program pemerintah seperti bantuan keuangan, pelatihan, dan peluang pemasaran. Banyak dari program-program ini dirancang untuk membantu UMKM tumbuh, namun jika kebijakan berubah tanpa peringatan yang jelas, banyak usaha akan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan program

tersebut. Hal ini semakin memperlebar kesenjangan antara usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) dan perusahaan besar yang dapat beradaptasi lebih cepat.

Regulasi yang tidak konsisten juga menghambat investasi domestik dan internasional. Investor menghindari pasar berisiko karena ketidakpastian hukum. Jika UMKM gagal memastikan keberlanjutan usahanya, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan, mengingat kontribusi UMKM yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan lapangan kerja.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, memerlukan upaya bersama antara pemerintah dan pemangku kepentingan UKM. Pemerintah harus meninjau regulasi secara berkala untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan demi kenyamanan pelaku usaha. Agar UMKM dapat beradaptasi dengan cepat, sosialisasi dan edukasi mengenai kebijakan baru harus menjadi prioritas. Langkah-langkah ini diharapkan UMKM untuk beroperasi di lingkungan yang lebih stabil dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2. Keterbatasan Infrastruktur.

Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu landasan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha. Keterbatasan infrastruktur menjadi kendala serius bagi para pelaku ekonomi, baik usaha kecil maupun besar. Berikut keterbatasan yang infrastruktur yang dihadapi pelaku usaha adalah sebagai berikut:

a. Transportasi yang Tidak Memadai

Salah satu keterbatasan yang paling kentara adalah terkait infrastruktur

transportasi. Jalan yang rusak, transportasi umum yang tidak efisien, dan kurangnya akses ke pelabuhan dan bandara dapat menghambat pengiriman barang. Pelaku usaha berjuang untuk mengirimkan produk ke pelanggan dan mendapatkan bahan mentah dari pemasok. Hal ini berdampak pada peningkatan biaya logistik dan juga berdampak pada harga jual produk. Hal ini juga berdampak pada keterlambatan pengiriman, yang berarti produk membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke pelanggan.

b. Keterbatasan Teknologi Informasi

Di era digital saat ini, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangatlah penting. Keterbatasan jaringan internet dan infrastruktur digital dapat menghambat pelaku usaha dalam menerapkan teknologi terkini. Hal ini berkontribusi terhadap kesulitan pemasaran. Tanpa akses internet yang baik, para pengusaha sulit menjual produknya secara online. Hal ini sangat penting dalam lingkungan kompetitif saat ini.

c. Akses ke Pembiayaan

Infrastruktur keuangan yang lemah, termasuk bank dan lembaga keuangan lainnya, membatasi akses terhadap dana yang dibutuhkan pelaku usaha untuk berkembang.

Hal ini membuat investasi menjadi sulit, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) seringkali mengalami kesulitan memperoleh pendanaan, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam pembangunan. Selain itu, pembatasan inovasi dan kurangnya akses terhadap keuangan mempersulit pelaku ekonomi untuk berinovasi dan meningkatkan produk dan

layanan mereka.

Keterbatasan infrastruktur merupakan tantangan besar bagi para pemangku kepentingan pelaku usaha. Namun, dengan pendekatan yang tepat, permasalahan tersebut dapat diatasi. Meningkatkan investasi, mengembangkan keterampilan dan meningkatkan akses terhadap keuangan merupakan langkah-langkah penting yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi infrastruktur. Dengan cara ini, pelaku usaha dapat bekerja lebih efisien, menciptakan inovasi, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kendala infrastruktur bukanlah sebuah masalah tunggal, dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat mengubah tantangan menjadi peluang.

3. Kesadaran dan Pengetahuan

Kesadaran dan pengetahuan merupakan dua faktor penting bagi seorang wirausahawan dalam menjalankan usahanya. Di era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, peningkatan kesadaran terhadap dinamika pasar dan pengetahuan menyeluruh terhadap berbagai aspek operasional dan strategis menjadi landasan keberhasilan seorang wirausaha. Menyadari dinamika pasar, lingkungan bisnis, dan isu-isu sosial membantu pelaku ekonomi mengambil keputusan yang lebih baik dan merespons perubahan. Namun, pemahaman komprehensif tentang operasi, teknologi, dan keuangan sangat penting untuk menjalankan bisnis secara efektif.

Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan melalui pendidikan, pelatihan dan jaringan, pelaku ekonomi memiliki posisi yang lebih baik untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang pasar. Di dunia yang terus

berubah, kesadaran dan pengetahuan merupakan aset berharga yang tidak dapat diabaikan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bab ini merupakan hasil dan kesimpulan dalam penelitian Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tengah Pengaruh Dinamika Politik Lokal dan Nasional.

Ada beberapa hal yang menjadi fokus utama:

1. Pemberdayaan dan Pelatihan UMKM.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat secara rutin melakukan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha UMKM.

2. Penyediaan Akses Pembiayaan

Pemerintah daerah berusaha membuka akses yang lebih luas untuk pembiayaan UMKM, baik melalui dana dari pemerintah daerah, program pembiayaan yang dikelola oleh perbankan, maupun skema pendanaan berbasis koperasi.

3. Kebijakan Pemerintah dalam Infrastruktur dan Regulasi

Pembangunan infrastruktur yang tepat, seperti akses jalan raya, pusat distribusi dan pasar digital, akan mendorong perkembangan UMKM. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat mengubah kebijakan dan regulasi mengenai izin usaha untuk memudahkan pelaku usaha UMKM.

4. Pemanfaatan Potensi Lokal dan Sumber Daya Alam

Aceh Barat memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan

industri berbasis sumber daya alam. Pemerintah daerah seringkali fokus pada pengembangan UMKM yang memanfaatkan potensi lokal ini, sambil meminimalkan ketergantungan pada pasar luar daerah.

5. Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Nasional

Mengingat dinamika politik lokal dan nasional, pemerintah Kabupaten Aceh Barat sering kali berusaha untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Aceh dan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan anggaran yang dapat mempercepat pengembangan UMKM. Dalam hal ini, hubungan antara kebijakan politik daerah dan kebijakan nasional yang mendukung UMKM dapat memperkuat daya saing usaha kecil dan menengah di daerah ini.

6. Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi dan Digitalisasi

Di era digital, banyak UMKM yang berkembang pesat melalui platform online. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat mendukung pengembangan ini dengan meningkatkan akses internet dan memberikan pelatihan digital kepada pelaku UMKM.

Strategi pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam pengembangan UMKM menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh dinamika politik, langkah-langkah yang diambil, seperti pelatihan, akses pembiayaan, promosi, dan pengembangan infrastruktur, menjadi landasan penting dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.

Meskipun strategi yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian,

Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Barat cukup baik, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya:

Sumber Daya Manusia yang Terbatas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM di Aceh Barat menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah dan kualitas tenaga pendamping yang dapat memberikan pelatihan dan bimbingan yang optimal bagi UMKM. Hal ini berdampak pada terbatasnya jangkauan program dan kualitas pelatihan yang diberikan.

Keterbatasan Dana Program-program pengembangan UMKM memerlukan dana yang besar, sementara anggaran yang tersedia terbatas. Ini menyebabkan tidak semua UMKM yang membutuhkan bantuan dapat dijangkau. Selain itu, pembiayaan yang disediakan sering kali hanya mencakup modal kecil dan jangka pendek, sementara UMKM membutuhkan dana yang lebih besar dan jangka panjang untuk ekspansi usaha.

Kurangnya Infrastruktur dan Teknologi Walaupun ada upaya untuk membangun infrastruktur yang mendukung, masih banyak daerah di Aceh Barat yang kekurangan fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan UMKM. Selain itu, kurangnya akses terhadap teknologi terkini juga menjadi kendala bagi pengusaha UMKM dalam berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran untuk strategi dinas perdagangan perindustrian koperasi dan ukm dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kabupaten aceh barat:

1. Peningkatan Koordinasi Antarlembaga. Pemerintah perlu meningkatkan

koordinasi antara instansi terkait untuk menciptakan sinergi dalam program pengembangan UMKM, sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal.

2. Pelatihan dan pendampingan misalnya memberikan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan kepada pelaku usaha UMKM untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi perubahan pasar dan dinamika politik
3. Akses Pembiayaan. Meningkatkan akses terhadap sumber pembiayaan, baik dari lembaga perbankan maupun program pemerintah, dengan memberikan informasi yang jelas dan proses yang sederhana.
4. Periklanan dan pemasaran. Memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan produk UMKM dan menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk konteks nasional dan internasional.
5. Monitoring dan evaluasi. Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pengembangan UMKM, kebijakan dan program yang dilaksanakan dipantau dan dievaluasi secara berkala.
7. Kemitraan Strategis. Membangun kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat jaringan dan meningkatkan daya saing UMKM.

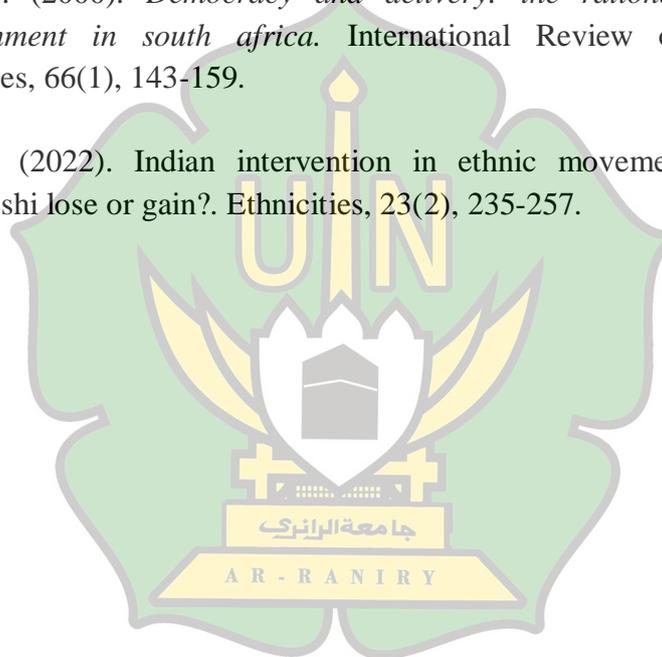
Saran-saran tersebut diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Barat untuk menghadapi tantangan yang ada

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, and Muslimah, 'Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif', *Proceedings*, 1.1 (2021), pp. 173–86
- Andhita Fatikha Sari, Rizki Hergia Sampurna, Dine Meigawati, 'Strategi Dinas Koperasi UKM Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Sukabumi', 3.7 (2022), pp. 6967–74
- APRIANTO, NAERUL EDWIN KIKY, 'Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam', *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2018), pp. 169–88
- Destriana, Eltina, and Arief Rifa'i Harahap, 'Pengaruh Keberadaan Objek Wisata Islamic Centre Terhadap Pengembangan Ukm (Usaha Kecil Menengah)', *Jurnal Valuta*, 6.2 (2020), pp. 118–37
- Hamid, Edy Suandi, and Y. Sri Susilo, 'Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*', *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12.1 (2015), p. 45
- Lubis, Fauzi Arif, Nur Rahmani Bi Ahmadi, and Intan Kartika Putri, 'Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT. PNM Kota Medan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.1 (2023), pp. 949–62
- Muh. Kadarisman, Izzatusholekha, and Nadia Putra, 'Dinamika Politik Dalam Reformasi Administrasi Publik', *KAIS: Kajian Ilmu Sosial*, 2.1 (2021), pp. 141–57
- Nalle, Frederic Winston, 'Metode Penelitian Kualitatif', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2019, 35
- Pujiono, Arif, Ro'fah Setyawati, and I Idris, 'Strategi Pengembangan Umkm Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global', *Indonesia Journal of Halal*, 1.1 (2018), p. 1
- Rivki, Muhammad, Adam Mukharil Bachtiar, Teknik Informatika, Fakultas Teknik, and Universitas Komputer Indonesia, *Metode Penelitian Kualitatif*

- Suprayogo, Imam, and Tobroni, 'Metodelogi Penelitian Agama', *Metodologi Penelitian*, 2014, p. 102
- Yuli Rahmini Suci, 'Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah', *UU No. 20 Tahun 2008*, 1, 2008, pp. 1–31
- Nurjaman, A. (2020). *Ekonomi Politik Dalam Teori dan Praktek (Vol. 1)*. UMMPress.
- Midaada, A. (2017). *Dinamika Politik Lokal dalam Industri Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Peraturan Daerah No. 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Rusmijati, *TEORI Ekonomi Mikro I*, Graha Cendekia
- NAERUL EDWIN KIKY APRIANTO, 'Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam', *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2018), pp. 169–88.
- Rahman, dkk (2022). *Intervensi tarif pajak daerah menurut undang-undang cipta kerja: analisis implikasi dan strategi pemulihan ekonomi kala pandemi covid-19*. *Educoretax*, 2(1), 35-48.
- Wijayaningsih, dkk (2021). *Analisis program bantuan presiden produktif usaha mikro, kecil, dan menengah pada masa pandemi covid-19 kabupaten sleman yogyakarta*. *Jurnal Wacana Kinerja Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24(2), 98.
- Kusumawardhana, I. (2023). *A dynamic system approach: modalitas kontrol pemerintah terhadap agenda pembangunan di negara berkembang*. *Thejournalish Social and Government*, 4(2), 146-162.
- Sinaga, dkk (2022). *Impact of government interventions on the stock market during covid-19: a case study in indonesia*. *Sn Business & Economics*, 2(9).
- Anjani, W. and Purnamasari, V. (2023). Analisis faktor yang mempengaruhi minat pengajuan kur super mikro pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 28(1), 98-112.

- Mutoni, K. (2024). The role of government intervention in mitigating economic shocks. *International Journal of Economic Policy*, 4(2), 14-26.
- Wu, L. and Wang, C. (2022). *Research on rural environmental pollution control path under administrative intervention mechanism*. *Ecological Chemistry and Engineering S*, 29(3), 391-402.
- Zhang, dkk (2021). *Does government intervention ensure food safety? evidence from china*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(7), 3645.
- Pycroft, C. (2000). *Democracy and delivery: the rationalization of local government in south africa*. *International Review of Administrative Sciences*, 66(1), 143-159.
- Jnawali, H. (2022). Indian intervention in ethnic movement of nepal: did madheshi lose or gain?. *Ethnicities*, 23(2), 235-257.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Penelitian

Informan ketua bidang koperasi usaha kecil dan menengah (Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Ukm)

1. bagaimana ibu melihat peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan umkm ditengah pengaruh dinamika politik lokal dan nasional?
2. apa strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan umkm dikabupaten Aceh Barat?
3. Apa saja kebijakan dan program yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan umkm di Kabupaten Aceh Barat?
4. Bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dan pelaku umkm di Kabupaten Aceh Barat?
5. Apa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menerapkan strategi pengembangan umkm di tengah dinamika politik lokal?
6. Sejauh mana keberhasilan strategi pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengembangkan umkm dipengaruhi oleh pergeseran kekuasaan politik di tingkat lokal?
7. Apa peran lembaga-lembaga lokal atau organisasi masyarakat sipil dalam mendukung strategi pengembangan umkm di Kabupaten Aceh Barat?
- 8, Bagaimana kebijakan politik lokal mempengaruhi akses UMKM terhadap sumber daya dan dukungan pemerintah di Kabupaten Aceh Barat?

9. Bagaimana evaluasi yang dilakukan terhadap program-program pengembangan umkm di kabupaten aceh barat?

10. apakah ada terdapat contoh dimana kebijakan pemerintah daerah berhasil mendukung umkm?

11. apa saja regulasi pemerintah daerah yang berpotensi menghambat dan mendukung pengembangan umkm dikabupaten aceh barat?

12. apakah ada perbedaan dalam dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengembangan umkm dikabupaten aceh barat?

Informan tokoh masyarakat pelaku umkm:

1. sejauh mana bapak/ibu terlibat dalam program-program pemerintah yang mendukung pengembangan umkm?

2. bagaiman menurut bapak/ibu efektivitas program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam membantu mengembangkan umkm?

3. apa saja kendala atau hambatan yang bapak/ibu alami dalam mengakses bantuan atau program-program yang disediakan oleh pemerintah dalam pengembangan umkm?

4. apa bentuk dukungan politik yang diterima oleh bapak/ibu dalam pengembangan umkm?

5. bagaimana harapan bapak/ibu terhadap strategi pemerintah kabupaten aceh barat dalam pengembangan umkm ditengah pengaruh dinamika politik lokal dan nasional?

Lampiran 2 Surat Penelitian

Surat Izin Penelitian Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1677/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/08/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab Aceh Barat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KINTAN NANDA CAHYANI / 200801020**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Ie masen kayee adang kee syiah kuala, banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Strategi pemerintah kabupaten aceh barat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di tengah pengaruh dinamika politik lokal dan nasional*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 September 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 05 Februari 2025

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 3 Surat Balasan Pemerintah

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT**
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jln. Sisingamangaraja Telp. (0655) 7012805 Fax. (0655) 7551303/Email: Disdag.acehbarat@gmail.com
MEULABOH

Meulaboh, 23 September 2024

Nomor : 800 /451/ IX/ 2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Melakukan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

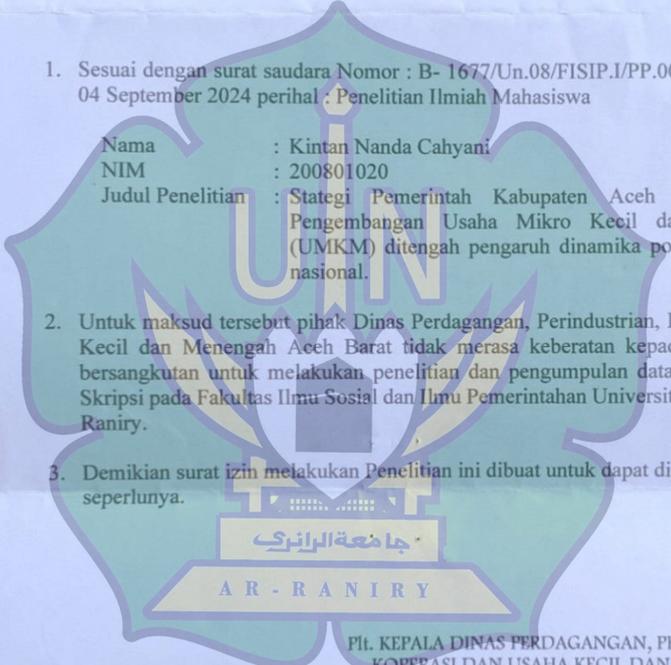
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar- Raniry
Di -
Tempat

1. Sesuai dengan surat saudara Nomor : B- 1677/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/08/2024 tanggal 04 September 2024 perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Nama : Kintan Nanda Cahyani
NIM : 200801020
Judul Penelitian : Stategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ditengah pengaruh dinamika politik local dan nasional.

2. Untuk maksud tersebut pihak Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh Barat tidak merasa keberatan kepada Mahasiswi yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data guna penyelesaian Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

3. Demikian surat izin melakukan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.


AR - RANIRY

Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ACEH BARAT


FAUZI, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19741210 200701 1 021

Tembusan :
1. Pertinggal----

Lampiran 4

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Mariana Jamil sebagai kabid ukm dinas



Wawancara bersama Mawardi kabid perindustrian



Wawancara dengan pekerja salah satu UMKM Dirham Ikan Lele



Wawancara bersama pelaku umkm



Wawancara bersama pemilik usaha penjahit



Wawancara bersama ibu pemilik usaha laundry



Wawancara bersama ibu Nur pemilik usaha Kue Tradisional



Wawancara bersama pemilik usaha Warung Kopi